DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Buku Manual Coretax SPT Masa PPh Pasal 21/26. Jakarta*: Direktorat Jenderal Pajak**.**

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPh 21*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Mardiasmo. (2020). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pegawai pada Kategori Usaha Tertentu*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Anggraeni, D., & Nugroho, A. (2024). *Panduan Perpajakan: PPh Pasal 21, Hak dan Kewajiban Pemotong, serta Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax)*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Sartika, D., & Arief, M. (2026*). Perbandingan metode net, gross, dan gross up dalam strategi penghematan pajak terutang perusahaan. JAMEK (Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi dan Kewirausahaan),* 6(1), 213–222.

Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan*

Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak

Panggabean, L., & Delfina, B. (2023). Dominasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Akan Sanksi Pajak. *Vol. 15, No.1, Februari 2023,* 109-118.